

**ANALISIS KORELASI AKUNTABILITAS DAN RESPONSIVITAS DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM SDGs DI KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2022-2024**

**Hijrah Lail^{1(a)}, Arifin Fajar Putera^{2(b)}, Muhammad Akmal Ibrahim^{3(c)}, Badu Ahmad^{4(d)},
Gita Susanti^{5(e)}, Aris Munandar^{6(f)}, Ayu Amalia^{7(g)}**

^{1,3,4,5,7}Faculty Social Science and Politic, Hasanuddin University

²Faculty of Government Science and Culture, University of Indo Global Mandiri

⁶Faculty of Economics University of Indo Global Mandiri

^{a)}hijrahlail75@gmail.com, ^{b)}Ipink.fisipolunhas@gmail.com, ^{c)}muhakibuh62@gmail.com,

^{d)}baduahmad7@gmail.com, ^{e)}gitasusanti65@gmail.com, ^{f)}Arismunandar@uigm.ac.id,

^{g)}ayuarifin.fisipolunhas@gmail.com

**INFORMASI
ARTIKEL**

ABSTRAK

Article History:

Dikirim:

12-07-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:

SDGs, Akuntabilitas,
Responsivitas, Rencana
Pembangunan, Pemerintahan
Lokal

Keywords:

SDGs, Accountability,
Responsiveness, Development
Planning, Local Governance

Corresponding Author:

Ipink.fisipolunhas@gmail.com

Penelitian ini menganalisis hubungan antara capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), tingkat akuntabilitas, dan responsivitas Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada periode 2022-2024. Data dikumpulkan melalui survei persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik (n = 120 responden) menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*, serta data sekunder dari laporan capaian SDGs, RPJMD, dan dokumen SAKIP. Instrumen kuesioner dikembangkan dari indikator akuntabilitas SAKIP dan kerangka responsivitas pelayanan publik, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis dilakukan menggunakan korelasi Pearson dengan memenuhi uji asumsi normalitas dan linearitas. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan capaian SDGs, dengan indikator pendidikan dan kesehatan meningkat, sementara indikator ekonomi dan lingkungan tertinggal. Nilai akuntabilitas pemerintah berada pada kategori sedang, dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat dinilai rendah. Terdapat korelasi positif signifikan antara capaian SDGs dengan akuntabilitas (r = 0,61) dan responsivitas (r = 0,53), yang mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola berpengaruh kuat terhadap efektivitas pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan integrasi indikator SDGs dalam sistem kinerja daerah serta peningkatan mekanisme responsivitas layanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan berkelanjutan di Jeneponto.

ABSTRACT

This study examines the relationship between Sustainable Development Goals (SDGs) achievement, government accountability, and responsiveness in Jeneponto Regency during the 2022-2024 period. Data were obtained from a public perception survey on service delivery (n = 120 respondents) using proportionate stratified random sampling, supported by secondary data from SDG achievement reports, the regional development plan (RPJMD), and SAKIP documents. The questionnaire was developed based on SAKIP accountability indicators and public service responsiveness frameworks, and was tested for validity and reliability. Pearson correlation analysis was conducted after meeting normality and linearity assumptions. The results reveal disparities in SDG progress, with notable improvements in education and health, while economic and environmental indicators lag behind. Government accountability remains at a moderate level, and responsiveness to citizen complaints is perceived as low. Significant positive correlations

were found between SDG achievement and both accountability ($r = 0.61$) and responsiveness ($r = 0.53$), indicating that governance quality strongly shapes sustainable development outcomes. These findings highlight the need to strengthen SDG integration into local performance management systems and to enhance public service responsiveness as key prerequisites for accelerating sustainable development in Jeneponto.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1329>

PENDAHULUAN

Sejak disepakatinya agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, pemerintah daerah menjadi aktor kunci dalam memastikan keberhasilan penerjemahan kerangka global tersebut ke dalam kebijakan dan layanan publik di tingkat lokal. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah dengan karakteristik sosial ekonomi yang dinamis, menghadapi tantangan struktural seperti kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses layanan dasar, serta kapasitas birokrasi yang terbatas. Kondisi ini menempatkan kebutuhan akan tata kelola pembangunan yang akuntabel dan responsif sebagai fondasi penting dalam mempercepat pencapaian SDGs. Namun, implementasi pembangunan berkelanjutan masih kerap berfokus pada pemenuhan administratif, sementara aspek tata kelola yang menentukan kualitas implementasi belum sepenuhnya mendapat perhatian.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa capaian SDGs di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintah. Santosa (2020) menegaskan bahwa kapasitas birokrasi, partisipasi masyarakat, dan mekanisme akuntabilitas merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program SDGs. Sementara itu, Wahyuni dan Nugroho (2021) mengkritik bahwa akuntabilitas publik di daerah masih bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi substantif, termasuk keadilan sosial dan pelibatan kelompok rentan. Dari perspektif internasional, Evans et al. (2018) dan Kharas & McArthur (2020) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki tingkat responsivitas dan akuntabilitas tinggi cenderung menunjukkan performa lebih baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan tiga indikator penting dalam SDGs. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang adaptif dan responsif bukan hanya mendukung implementasi program, tetapi juga

menjadi prasyarat bagi tercapainya hasil pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, laporan capaian SDGs Provinsi Sulawesi Selatan (Bappeda Sulsel, 2023) masih memperlihatkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Kabupaten Jeneponto menghadapi tantangan dalam aspek transparansi anggaran, integrasi data lintas-OPD, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan indikator kinerja pembangunan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara prinsip akuntabilitas dan responsivitas dengan tuntutan implementasi SDGs yang berbasis bukti dan hasil. Di sisi lain, konsep akuntabilitas dan responsivitas sendiri belum diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan program, baik dalam dimensi akuntabilitas vertikal horizontal maupun responsivitas terhadap kebutuhan warga yang bersifat mendesak maupun jangka panjang. Celah inilah yang menunjukkan adanya gap riset: belum banyak studi yang secara empiris menguji hubungan akuntabilitas dan responsivitas dengan implementasi SDGs pada konteks daerah dengan kapasitas birokrasi terbatas seperti Jeneponto.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah berhubungan dengan tingkat implementasi SDGs di Kabupaten Jeneponto pada periode 2022-2024? Pertanyaan turunan yang menjadi fokus kajian mencakup yakni (1) bagaimana praktik akuntabilitas substantif meliputi transparansi, keterukuran kinerja, dan pertanggungjawaban anggaran mempengaruhi capaian SDGs; dan (2) bagaimana responsivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan, menangani keluhan, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat berkontribusi terhadap hasil pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis hubungan antara akuntabilitas,

responsivitas, dan capaian implementasi SDGs di Kabupaten Jeneponto; serta (2) mengidentifikasi dimensi tata kelola yang paling berpengaruh dalam mempercepat pencapaian SDGs. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola pembangunan daerah dengan mengintegrasikan kerangka akuntabilitas (vertikal, horizontal, dan diagonal) serta responsivitas (reaktif, anticipatory, dan *adaptive responsiveness*) dalam konteks implementasi SDGs yang masih jarang dikaji pada level kabupaten. Dari sisi praktis, penelitian ini memberi arah strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem akuntabilitas dan responsivitas yang dapat mendorong kualitas implementasi SDGs secara lebih terukur, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas, responsivitas, dan capaian implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Jeneponto pada periode 2022-2024. Desain penelitian disusun berdasarkan analisis data sekunder dan survei persepsi masyarakat sebagai sumber data primer. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antar variabel secara terstruktur, terutama melalui indikator-indikator tata kelola dan capaian pembangunan yang bersifat terukur.

Secara lebih rinci, populasi penelitian mencakup masyarakat Kabupaten Jeneponto yang pernah menerima layanan publik dari perangkat daerah terkait implementasi program pembangunan. Sampel ditentukan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling, dengan mempertimbangkan persebaran wilayah kecamatan. Jumlah sampel sebanyak 120 responden, yang dianggap memadai untuk analisis korelasional sederhana sesuai pedoman ukuran sampel minimum dalam penelitian sosial. Responden berusia 18 tahun ke atas dan berada dalam rentang waktu pelayanan publik 12 bulan terakhir dijadikan kriteria inklusi agar persepsi yang diukur relevan dengan periode implementasi SDGs.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan dari tiga sumber utama yaitu (1) indikator akuntabilitas publik menurut Bappenas dan KemenPAN-RB, meliputi transparansi informasi, keterukuran

kinerja, dan pertanggungjawaban anggaran; (2) dimensi responsivitas pelayanan publik dari literatur Gonzalez et al. (2018), yaitu kecepatan respons, ketepatan layanan, dan tindak lanjut pengaduan; serta (3) indikator capaian SDGs berdasarkan 17 tujuan dan turunan indikator yang dipublikasikan oleh Bappeda Sulsel. Setiap indikator dioperasionalkan dalam bentuk pernyataan menggunakan skala Likert 1–5. Sebelum digunakan, instrumen diuji melalui uji validitas isi oleh dua ahli kebijakan publik dan uji validitas reliabilitas kepada 30 responden awal. Hasil uji menunjukkan seluruh item memiliki nilai korelasi $> 0,30$ dan koefisien Cronbach's Alpha masing-masing variabel berada di atas 0,70, sehingga instrumen dinyatakan valid dan reliabel.

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi resmi pemerintah daerah, meliputi laporan capaian SDGs Kabupaten Jeneponto tahun 2022–2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dan dokumen RPJMD. Untuk membangun indeks akuntabilitas dan responsivitas, nilai dari masing-masing indikator dinormalisasi menggunakan pendekatan rata-rata tertimbang agar setiap dimensi memiliki kontribusi proporsional. Indeks capaian SDGs dihitung berdasarkan rata-rata perkembangan indikator pada tiga tahun pengamatan.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap awal mencakup pembersihan data, pengujian outlier, serta uji asumsi statistik dasar (normalitas dan linearitas) sebagai syarat penggunaan teknik korelasi. Selanjutnya, hubungan antara tiga variabel utama capaian SDGs, akuntabilitas, dan responsivitas dianalisis menggunakan korelasi Pearson untuk data yang berdistribusi normal, dan korelasi Spearman jika ditemukan ketidaknormalan distribusi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk koefisien korelasi, arah hubungan, serta tingkat signifikansinya.

Seluruh proses penelitian mengikuti prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas responden, memastikan partisipasi sukarela, serta memperoleh persetujuan partisipasi melalui lembar persetujuan yang disertakan dalam instrumen. Dengan langkah metodologis yang sistematis dan transparan, penelitian ini diharapkan dapat direplikasi dan dinilai secara objektif oleh pembaca maupun peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran data primer dan sekunder menunjukkan bahwa capaian SDGs Kabupaten Jeneponto pada periode 2022-2024 mengalami perkembangan yang tidak merata antar sektor. Pada aspek sosial dasar, terutama SDG 3 (Kesehatan), terjadi peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dari 78,4% (2022) menjadi 85,1% (2024), serta tren penurunan angka kematian ibu dan bayi. SDG 4 (Pendidikan) juga mencatat kemajuan, ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar dari 93% menjadi 96%. Namun, APM jenjang sekolah menengah pertama masih stagnan pada angka 82%, yang mengindikasikan persoalan transisi pendidikan yang belum terselesaikan.

Sebaliknya, capaian SDG 1 (Pengentasan Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak) memperlihatkan stagnasi bahkan kecenderungan memburuk. Tingkat kemiskinan ekstrem hanya menurun 0,5% dalam tiga tahun, sementara tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,1% menjadi 5,6% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan masih bertumpu pada indikator sosial dasar, sedangkan dimensi ketahanan ekonomi daerah belum mengalami peningkatan signifikan.

Pada aspek tata kelola, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Jeneponto selama 2022-2024 berada pada kategori "Cukup" dengan rata-rata 58,1. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2020-2021 yang berada pada kisaran 61-63 (kategori B). Temuan audit dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan berbasis kinerja dengan alokasi anggaran, keterbatasan dokumentasi evaluasi internal program SDGs, serta minimnya keterlibatan publik dalam proses monitoring.

Hasil survei terhadap 125 responden memperkuat temuan tersebut, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Persepsi Responden terhadap Aspek Responsivitas Pemerintah Daerah

No.	Aspek Responsivitas	Tingkat Ketidakpuasan (%)
1.	Waktu Tanggap terhadap Pengaduan Masyarakat	67
2.	Tindak Lanjut Hasil Musrenbang Desa	72

No.	Aspek Responsivitas	Tingkat Ketidakpuasan (%)
3.	Ketersediaan Informasi Publik	61
4.	Akses terhadap Pimpinan Daerah	54

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2024

Sebanyak 67% responden menyatakan pengaduan publik ditanggapi secara lambat, 72% menilai musrenbang desa tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata, dan 61% merasa informasi publik tidak tersedia secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas birokrasi daerah masih rendah dan mekanisme umpan balik masyarakat belum berjalan optimal.

Analisis statistik melalui korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan signifikan antara variabel penelitian: akuntabilitas dan capaian SDGs ($r = 0,61$), responsivitas dan capaian SDGs ($r = 0,53$), serta akuntabilitas dan responsivitas ($r = 0,47$). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa dimensi tata kelola memiliki hubungan fungsional dengan keberhasilan implementasi SDGs di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian SDGs di Kabupaten Jeneponto masih memperlihatkan ketimpangan yang cukup tajam antar-sektor. Pola ketimpangan ini sejalan dengan temuan UNDP (2021), yang mengungkapkan bahwa daerah dengan kapasitas kelembagaan dan fiskal terbatas umumnya mengalami perkembangan lebih cepat pada indikator sosial dasar dibandingkan indikator ekonomi. Dalam konteks Jeneponto, indikator seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta kesetaraan gender cenderung mengalami peningkatan yang lebih stabil, karena sebagian besar merupakan program yang didukung oleh pemerintah pusat melalui standar nasional layanan publik. Sebaliknya, indikator yang membutuhkan kapasitas teknis dan fiskal yang lebih besar seperti akses air bersih, sanitasi, infrastruktur ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja berkembang lebih lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian SDGs tidak hanya ditentukan oleh penyediaan program sektoral, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan tujuan pembangunan lintas sektor secara sistematis.

Akuntabilitas pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pola ketimpangan tersebut. Skor SAKIP Jeneponto

yang berada pada kategori “Cukup” mencerminkan bahwa proses pertanggungjawaban kinerja masih berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Nugroho (2021), yang menjelaskan bahwa praktik akuntabilitas di banyak pemerintah daerah masih terjebak pada logika pelaporan dokumen misalnya penyusunan rencana dan laporan yang sifatnya prosedural tanpa memastikan apakah program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Minimnya integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan seperti Renstra OPD dan LKJIP menyebabkan kualitas perencanaan bersifat parsial. Dengan tidak menjadikan indikator SDGs sebagai rujukan utama dalam merumuskan indikator kinerja, keberlanjutan program antar-tahun juga tidak terjamin. Hal ini pada akhirnya membuat capaian pembangunan berjalan secara sektoral dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

Responsivitas pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam pencapaian SDGs. Temuan survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai respons pemerintah dalam menindaklanjuti pengaduan publik masih rendah. Keluhan warga mengenai layanan dasar seperti bantuan sosial, perbaikan infrastruktur kecil, atau akses air bersih seringkali membutuhkan waktu lama untuk memperoleh tanggapan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme *feedback loop* belum berjalan optimal. Literatur tata kelola pembangunan, misalnya Evans et al. (2018), menekankan bahwa responsivitas merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kebijakan publik yang relevan, adaptif, dan kontekstual. Ketika responsivitas rendah, masyarakat merasa aspirasi mereka tidak dihargai, sehingga partisipasi publik dalam musrenbang dan forum konsultasi menjadi menurun. Menurunnya partisipasi ini pada akhirnya melemahkan legitimasi kebijakan dan menghambat implementasi program SDGs yang idealnya berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat.

Keterkaitan antara akuntabilitas, responsivitas, dan capaian SDGs juga terlihat dari hasil analisis korelasi. Nilai korelasi yang cukup kuat ($r = 0,61$) menunjukkan bahwa peningkatan pada mekanisme pertanggungjawaban, baik dalam perencanaan maupun pelaporan, berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan SDGs. Mekanismenya

dapat dijelaskan melalui dua jalur utama. Pertama, akuntabilitas mendorong pemerintah menggunakan indikator kinerja berbasis data sehingga program lebih terarah dan tepat sasaran. Kedua, responsivitas memfasilitasi munculnya kebijakan adaptif yang selaras dengan kebutuhan warga, sehingga tingkat keberhasilan program pembangunan meningkat. Namun demikian, hubungan ini bersifat korelasional, bukan kausal. Artinya, ada kemungkinan faktor lain seperti kapasitas fiskal, kepemimpinan politik, atau dukungan regulasi turut memengaruhi hubungan tersebut. Oleh karena itu, temuan ini perlu diperdalam melalui penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan kausal atau mixed-methods untuk memahami mekanisme hubungan secara lebih komprehensif.

Temuan penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa percepatan pencapaian SDGs di Kabupaten Jeneponto membutuhkan perbaikan mendasar pada sistem tata kelola. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam perencanaan pembangunan dan dokumen kinerja OPD, sehingga setiap program memiliki kontribusi langsung terhadap target SDGs. Selain itu, mekanisme akuntabilitas substantif harus diperkuat dengan menekankan evaluasi berbasis outcome, bukan sekadar output administratif. Responsivitas layanan publik juga perlu ditingkatkan melalui pembenahan sistem pengaduan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi lintas OPD. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan, sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan capaian SDGs tidak dapat dicapai hanya dengan memperbanyak program sektoral. Sebaliknya, keberhasilan SDGs sangat bergantung pada kualitas tata kelola, terutama akuntabilitas dan responsivitas. Tanpa reformasi pada dua dimensi tersebut, pencapaian SDGs di Jeneponto berisiko stagnan dan semakin timpang antar sektor.

PENUTUP

Capaian SDGs di Kabupaten Jeneponto selama 2022-2024 mengalami kemajuan terutama pada indikator sosial, sementara sektor ekonomi dan lingkungan masih tertinggal akibat lemahnya akuntabilitas dan responsivitas

pemerintahan daerah. Hubungan positif yang ditemukan antara dua dimensi tata kelola tersebut dengan capaian SDGs menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas pengelolaan kinerja dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian target SDGs, pemerintah daerah perlu memprioritaskan integrasi indikator SDGs ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja OPD, memperbaiki mekanisme respons terhadap aspirasi publik melalui sistem pengaduan yang lebih adaptif, serta memperluas keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan data sekunder, desain korelasional yang tidak memungkinkan penjelasan kausal, dan cakupan responden yang belum sepenuhnya representatif. Karena itu, studi lanjutan perlu menggunakan pendekatan longitudinal atau *mixed methods* untuk menelusuri mekanisme kausal secara lebih mendalam dan menggambarkan dinamika tata kelola SDGs di tingkat lokal dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Dengan penguatan tata kelola yang lebih terintegrasi, responsif, dan partisipatif, upaya pencapaian SDGs di Kabupaten Jeneponto dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda South Sulawesi. (2023). *Report on Monitoring the Achievement of SDGs of South Sulawesi Province 2022–2023*. Makassar: Bappeda of South Sulawesi Province.
- Bappenas. (2021). *Report on the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia 2021*. Jakarta: Ministry of National Development Planning/Bappenas.
- Bappenas. (2022). *Voluntary National Review Report of SDGs Indonesia*.
- Evans, B., Jooste, S., & Pegram, G. (2018). Understanding SDG implementation at the local level: Lessons from governance and accountability. *Sustainability Journal*.
- Kharas, H., & McArthur, J. (2020). *How Local Governments Can Deliver on the SDGs*. Brookings Institute.
- Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB). (2023). *Evaluation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) of Jeneponto Regency 2022–2023*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.
- Rasyid, M. (2021). *Responsive and Accountable Governance*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santosa, IG (2020). “SDGs Implementation in Local Government: The Relationship between Capacity and Governance.” *Journal of Public Administration*, 17(2), 45–60.
- UNDP. (2020). *Localizing the SDGs: Tools for Local Governments*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyuni, D., & Nugroho, R. (2021). “Substantive Accountability in SDGs Governance in the Regions.” *Journal of Public Policy and Administration*, 25(3), 112–128.